

## ABSTRAK

Dewasa ini Korporasi diakui sebagai salah satu subjek hukum Pidana di Indonesia. Salah satu Tindak Pidana yang saat ini marak dilakukan oleh korporasi di Indonesia ialah Tindak Pidana *Illegal Fishing*. Tindak Pidana *Illegal Fishing* yang saat ini marak terjadi sesungguhnya telah diatur secara Khusus dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1985 jo. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, namun fakta telah berbicara (*res ipsa loquitur*) bahwa perairan Indonesia tetap saja menjadi sasaran empuk Tindak Pidana *Illegal Fishing* oleh korporasi asing sekalipun sudah tersedia peraturan perundang – undangan khusus yang memayunginya.

Metode yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini ialah Penelitian Yuridis Normatif , penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*).Spesifikasi penelitian ini ialah bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitain diperoleh kesimpulan bahwakebijakan – kebijakan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada saat ini belum mampu mewujudkan pertanggungjawaban korporasi secara langsung, hal ini disebabkan kebijakan – kebijakan yang ada saat ini cenderung inkonsisten, tidak seragam dan tidak komprehensif. Kelemahan dalam Undang – Undang Perikanan Indonesia tidak lain ialah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi dilakukan secara terbatas, korporasi diakui sebagai subjek hukum namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara langsung karena yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukannya ialah Pengurus. Tidak diatur pula siapakah yang dapat mewakili korporasi dalam pesidangan, kedua, batasan mengenai kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi juga tidak dijelaskan secara detail. Yang terakhir, berkenaan dengan pidana yang dijatuhkan bagi korporasi juga sampai saat ini masih sebatas denda, tentunya pidana yang demikian tidaklah sebanding dengan kerugian yang dialami bangsa Indonesia.

Ketidakkampuan hukum saat ini dalam menghadapi kejahatan yang telah riil terjadi dalam masyarakat mendorong adanya formulasi bagi kebijakan dimasa yang akan datang karena bila terus dibiarkan hukum berjalan lebih lambat dari perkembangan masyarakat, yang menjadi korban ialah masyarakat itu sendiri. Pembaharuan formulasi kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana *Illegal Fishing* ialah urgensi yang harus segera di laksanakan agar terjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi rakyat untuk berdaulat atas wilayah perairan sendiri.

**Kata Kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Illegal Fishing, Formulasi Kebijakan**

## ABSTRACT

Nowadays the Corporation is recognized as one of the subjects of criminal law in Indonesia. One of the crimes currently being committed by corporations in Indonesia is Illegal Fishing Crime. Illegal fishing crimes that are currently rampant have actually been specifically regulated in Law Number 9 of 1985 jo. Law Number 31 Year 2004 jo. Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, but the fact has been talked (*res ipsa loquitur*) that Indonesian waters remain an easy target for Illegal Fishing Crimes by foreign corporations even though special laws and regulations are available for them.

The method used in Legal Writing is Normative Juridical Research, a study focused on examining the application of rules or norms in positive law. The approach used is the Comparative Approach and the Statute Approach. The specification of this study is qualitative.

Based on the results of the research, it can be concluded that the current legal policies governing corporate criminal liability have not been able to realize corporate responsibility directly, this is because current policies tend to be inconsistent, not uniform and not comprehensive. Weaknesses in the Indonesian Fisheries Law are nothing but criminal liability imposed on corporations is limited, corporations are recognized as legal subjects but cannot be directly accounted for because criminal liability for crimes committed is Management. It is also not regulated who can represent the corporation in a court session, secondly, the limitation regarding when a crime is committed by a corporation is also not explained in detail. The last, regarding the criminal sanctions imposed on corporations, is still limited to fines up to now, of course such crimes are not comparable to the losses suffered by the Indonesian people.

The current inability of the law to deal with crimes that have been real in society has led to the formulation of policies in the future because if the law continues to be allowed to proceed more slowly than the development of society, the victims are the community itself. The renewal of the formulation of the corporation's criminal liability policy in criminal acts of Illegal Fishing is the urgency that must be immediately implemented in order to ensure justice, certainty, and benefit for the people to be sovereign over their own territorial waters.

**Keywords: Corporations, Criminal Liability, Illegal Fishing Crime, Policy Formulation**